



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : YUDHI FRI AMARA
- Jabatan** : KEPALA
- NHK** : 693173

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	915.000.000
1. Tanah Seluas 385 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
3. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	48.000.000
1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA SV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	41.200.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	81.680.792
F. HARTA LAINNYA	Rp.	81.083.145
Sub Total	Rp.	1.166.963.937
III. HUTANG	Rp.	240.746.220
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	926.217.717

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.